

Judul : Omicron Ancam Pemulihan Ekonomi - Sri Mul Pasang Kuda-kuda
Tanggal : Minggu, 30 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Omicron Ancam Pemulihan Ekonomi

Sri Mul Pasang Kuda-kuda

Banyak kalangan mulai ketar-ketir dengan terus meningkatnya kasus Covid-19 varian Omicron. Sebab, jika penularannya tak mampu dikendalikan bisa mengganggu pemulihan ekonomi nasional.

MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yakin kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron di dalam negeri terkendali. Dengan begitu, agenda pemulihan ekonomi masih dapat berjalan sesuai rencana dan target.

“Kalau kita bisa *manage* masalah Covid-19 varian Omicron ini, tidak akan mengganggu proyeksi (pemulihan ekonomi) yang kita buat,” kata Luhut, di Jakarta, Kamis (27/1).

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini di kisaran 5,2 persen. Namun demikian, realisasinya bergantung pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tahun ini.

Luhut mengakui, kasus Omicron di Indonesia menimbulkan ketidakpastian bagi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Oleh karena itu, penanganan kasus Omicron harus dilakukan dengan tepat. Tapi, ditekannya, kasus Omicron bukan satu-satunya penyebab ketidak-

pastian perekonomian di 2022. Ekonomi Indonesia juga akan dipengaruhi ancaman perkembangan ekonomi global.

“Seperti ancaman penurunan likuiditas dari *tapering off* kebijakan Amerika Serikat, *default* di sektor properti Tiongkok, hingga ancaman perubahan iklim,” terang Luhut.

Meski begitu, Luhut memastikan penanganan Covid-19 masih tetap menjadi prioritas Pemerintah. Butuh kerja sama semua pihak agar penanganan Covid-19 varian Omicron, tepat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan, kasus Omicron yang kian masif jadi perhatian serius Pemerintah. Berbagai penanganan dilakukan Pemerintah agar nantinya tidak terlalu banyak mempengaruhi kinerja perekonomian, khususnya di kuartal pertama 2022.

“Covid-19 varian Omicron di Indonesia masih rendah, namun kita memiliki kewaspadaan yang tinggi dengan tren kenaikan



Sri Mulyani

an penularan yang sekarang sifatnya lokal,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (27/1).

Ani-sapaan akrab Sri Mulyani menyebutkan, kasus rata-rata Covid-19 varian Omicron di dunia dalam 7 hari per 25 Januari 2022 mencapai 3,31 juta orang, dengan kematian sebanyak 8.000 jiwa. Sedangkan di Indonesia sudah 1.808 kasus dengan kematian 2 orang.

Agar penyebarannya bisa ditekan, kata Menkeu, Presiden Jokowi telah meminta seluruh jajaran untuk segera meningkatkan vaksinasi, termasuk booster sebagai langkah mencegah potensi terjadi gelombang varian Omicron.

Ani menyampaikan, berbagai langkah-langkah dalam menghadapi varian Omicron akan berpengaruh terhadap akselerasi pemulihan ekonomi.

Karena jalan menuju endemi ini tidak *smooth*. Setiap negara lain juga terus mencoba-coba.

“Jadi kami juga akan melihat perkembangan varian atau jenis virusnya, serta kemungkinan ditemukannya vaksin maupun pengobatan yang lebih baik,” tegasnya.

Ia memastikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 fleksibel dan antisipatif dalam menghadapi risiko pandemi, mempercepat pemulihan ekonomi, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, meningkatkan daya saing, serta mendukung reformasi struktural sebagai instrumen mewujudkan Indonesia Maju 2045.

“Kami sudah melihat momentum pemulihan ekonomi cukup

baik sampai saat ini. Kondisi yang baik ini yang akan terus kami jaga,” imbuhnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta, Pemerintah ekstra waspada dan belajar dari gelombang Covid-19 varian Delta pada Juli 2021.

“Jika Omicron kembali sebabkan peningkatan level Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2022 bisa ikut terkoreksi,” kata Bhima kepada *Rakyat Merdeka*.

Hal itu terjadi, lanjut Bhima, karena belanja masyarakat kembali melemah. Apalagi masyarakat sedang dihadapkan pada naiknya harga kebutuhan pangan dan ancaman kenaikan harga energi.

Aktivitas ekonomi yang terganggu, akan menimbulkan kekhawatiran pemulihan ekonomi.

Selain itu, menurutnya, perdagangan luar negeri juga relatif terpengaruh. Misalnya biaya logistik shipping naik 3-4 kali lipat ke beberapa negara tujuan ekspor karena adanya pembatasan sosial di negara mitra dagang Indonesia. ■ NOV